

**ANALISIS FENOMENA *FLYPAPER EFFECT* PADA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN/KOTA DI
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2006 – 2015**

(Skripsi)

Oleh
Ade Septiano Herlambang



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018

ABSTRAK

ANALISIS FENOMENA *FLYPAPER EFFECT* PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2006 - 2015

Oleh

Ade Septiano Herlambang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena *Flypaper Effect* pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2006 - 2015. fenomena tersebut dilihat dari pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Pegawai. Data yang digunakan adalah data sekunder yang disusun secara panel yang terdiri dari 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan pendekatan *Fixed Effect Model*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi fenomena *Flypaper Effect* pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung periode tahun 2006 - 2015. Hal tersebut ditandai dari koefisien Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Pegawai lebih besar jika dibandingkan dengan koefisien Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Pegawai.

Kata Kunci : *Flypaper Effect*, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Daerah, Belanja Pegawai, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengeluaran Pemerintah

ABSTRACT

FLYPAPER EFFECT PHENOMENA ANALYSIS ON REGIONAL AND DISTRICT BUDGET REGIONAL CENTER IN LAMPUNG PROVINCE 2006 - 2015

By

Ade Septiano Herlambang

This study aims to determine the phenomenon of *Flypaper Effect* at the Regency / City in Lampung Province in 2006 - 2015, seen from the influence of the Original Income and General Allocation Fund on Employee Expenditure. The data used are secondary data compiled by panel consisting of 10 districts / cities in Lampung Province. The analysis tool used is panel data regression analysis with *Fixed Effect Model* approach. The results showed that *Flypaper Effect* phenomenon has occurred in the Regency / City in Lampung Province for the period of 2006 - 2015. It is marked from the coefficient of General Allocation Fund to the Employee Expenditure is bigger when compared with the coefficient of Original Regional Income on Employee Expenditure.

Keywords: *Flypaper Effect, Local Original Income, General Allocation Fund, Regional Expenditure, Employee Expenditure, Local Budget and Expenditure Budget, Government Expenditure*

**ANALISIS FENOMENA *FLYPAPER EFFECT*
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2006 - 2015**

Oleh

Ade Septiano Herlambang

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

SARJANA EKONOMI

Pada

Jurusan Ekonomi Pembangunan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2018

Judul Skripsi : **ANALISIS FENOMENA *FLYPAPER*
EFFECT PADA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI
LAMPUNG TAHUN 2006 - 2015**

Nama Mahasiswa : **Ade Septiano Herlambang**

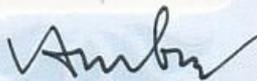
Nomor Pokok Mahasiswa : 1111021002

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

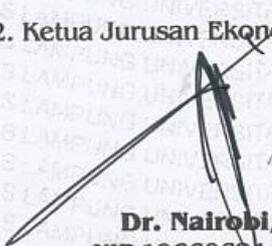
MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Dr. Ambya, S.E., M.Si.
NIP 19590719 198703 1 002

2. Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

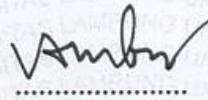


Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP 19660621 199003 1 003

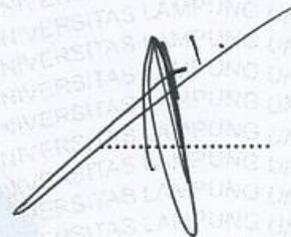
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

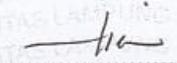
Ketua : Dr. Ambya, S.E., M.Si.



Penguji I : Dr. Nairobi, S.E., M.Si.



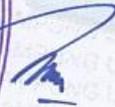
Penguji II : Dr. Lies Maria Hamzah, S.E., M.E.



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.
NIP 19610904 198703 1 011



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 15 Desember 2017

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak merupakan hasil karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi sesuai peraturan yang berlaku"

Bandar Lampung, 05 Desember 2017

Penulis



Ade Septiano Herlambang

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Ade Septiano Herlambang. Penulis dilahirkan pada tanggal 28 Rabiul Awwal 1414 H, bertepatan pada hari Rabu, 15 September 1993 di Bandar Lampung. Penulis merupakan anak terakhir dari empat bersaudara, dari pasangan Supandani dan Siti Saptiatun.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak - Kanak (TK) di TK Kartika Jaya II - 31 Tanjung Karang Barat pada Tahun 1999, Sekolah Dasar (SD) di SD Kartika II - 6 Cimeng, Tanjung Karang Barat pada Tahun 2005, Sekolah Menengah Pertama di SMP Kartika II - 2 Bandar Lampung pada Tahun 2008 dan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 7 Bandar Lampung pada Tahun 2011.

Tahun 2011 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung Jurusan Ekonomi Pembangunan melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri Undangan. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di lembaga kemahasiswaan Rohani Islam (ROIS) sebagai Kepala Bidang Departemen Syiar Islam dan sebagai Kepala Badan Pengurus Harian (BPH) periode Tahun 2012-2014. Pada Tahun 2013 penulis melakukan kunjungan lapangan (KKL) ke Kementerian Koperasi dan Badan Kebijakan Fiskal.

MOTTO

Dan tidaklah Allah menciptakan Jin dan Manusia melainkan hanya
untuk beribadah (mentauhidkan) Allah.

(Qur'an Surah Adz – Dzariat : 56)

Dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan
diterima darinya dan di akhirat dia pasti akan termasuk
golongan orang - orang yang merugi.

(Qur'an Surah Ali Imron : 85)

Jika kamu ada di jalan yang benar menuju Allah, berlariilah.

Jika itu berat untukmu, berlari - lari kecillah.

Jika kamu lelah, berjalanlah.

Dan jika kamu tidak bisa, merangkaklah.

Tapi jangan pernah berhenti ataupun berbalik arah.

(Imam Syafi'i Rahimahullah)

Menyeru manusia hanya untuk mentauhidkan Allah, memperingati ummat akan
bahaya kesyirikan, berpegang teguh terhadap sunnah yang diajarkan oleh
Rasulullah berdasarkan pemahaman generasi terbaik ummat ini.

(Ade Septiano Herlambang)

Usaha, Do'a dan keridhoan kedua orang tua adalah sumber tenaga
untuk mendaki terjalnya Skripsi

(Ade Septiano Herlambang)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Segala Puji syukur hanyalah milik Allah subhanahu wata'ala dan shalawat serta salam semoga selalu tersanjung agungkan kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam, kupersembahkan karya ini dengan segala ketulusan dan kerendahan hati kepada :

Ibuku Siti Saptiatun dan Bapakku Supandani yang kucintai karena Allah, terima kasih atas doa dan kasih sayang yang diberikan kepadaku selama ini.

Serta dukungan semangat dari ibuku selama mengerjakan tugas akhir ini.

Saudara dan Saudariku, Taufik Imam Nugroho, Diana Wahyuningtyas Hapsari dan Happy Destriyanto Wahyudi yang telah menjadi motivasiku selama ini.

Teman - teman seperjuangan UKMF ROIS FEB Unila yang telah memberikan dukungan serta warna pada kehidupanku,

Sahabat - sahabat dari Jurusan Ekonomi Pembangunan terima kasih atas kebersamaan kita selama ini di Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dan

Almamater tercinta Jurusan Ekonomi Pembangunan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

SANWACANA

Puji syukur hanyalah milik Allah subhanahu wata'ala Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Fenomena *Flypaper Effect* Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2006 - 2015” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini dengan ketulusan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan do'a selama proses penyelesaian skripsi ini. Secara khusus, penulis ucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hi. Satria Bangsawan, S.E., M.Si selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Emi Mutmainah, S.E., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan.
4. Bapak Dr. Hi. Toto Gunarto, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak Dr. Ambya, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dengan penuh kesabaran, memberikan perhatian, motivasi, semangat dan sumbangan pemikiran kepada penulis demi terselesaikannya skripsi ini.

6. Ibu Dr. Lies Maria Hamzah, S.E., M.Si selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan saran, nasihat dan sumbangan pemikiran kepada penulis demi terselesaikannya skripsi ini.
7. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan saran, nasihat dan sumbangan pemikiran kepada penulis demi terselesaikannya skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pelajaran yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
9. Kedua orang tuaku, Ibuku Siti Saptiatun dan Bapakku Supandani.
Terima kasih atas cinta dan kasih sayang serta dukungan yang diberikan selama ini, kesabaran serta do'a yang tidak pernah lelah demi yang terbaik untuk anak - anaknya.
10. Kakak - kakakku Taufiq Imam Nugroho, Diana Wahyuningtyas Hapsari dan Happy Destriyanto Wahyudi. Terima kasih atas semangat dan motivasi untuk terus berjuang menyelesaikan skripsi.
11. Keponakanku, Khansa Tsabita, Khanzie dan Aqila yang menjadi penghiburku disaat menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman seperjuangan Keluarga Besar UKMF ROIS FEB Universitas Lampung sebagai pengalaman terindah dalam mewarnai perjalanan hidupku dikampus, teruntuk : Kak Surya, Kak Marwan, Kak Wira, Kak Julian, Kak Didik, Kak Andi, Kak Jaka, Kak Ilyas, Kak Kamal, Kak Adi, Kak Rey, Kak Ismail, Mbak Prima Helaubudi, Mbak Reni, Mbak Mita Rusmiati, Ahmad Zulkarnain, Mustaqim, Faris Yursanto, Sunarmo, Sulton Habib,

Hamid Zukhair, Rio YUSDIAN, Syahid Abdullah, Anggi Arief, Anggi Wahyu, Angga Saputra, Mahipal, Singgih, Abe, Imam, Yuriko, Bagus Trisetiawan, Bagus Sugiarta, Thaipan Sandi, Indra Pambudi, Ardanta dan seluruh keluarga besar lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, semoga segala aktivitas dakwah yang telah kita usahakan dahulu, menjadi pemberat amal ibadah kita dan kelak Allah izinkan kita untuk kembali dipertemukan di SurgaNya Allah subhanahu wata'ala.

13. Teman - teman seperjuangan Jurusan Ekonomi Pembangunan 2011 : Yoga, Rafiq, Fadhil Akmal, Romadhoni, Adi, Ditho, Asdi, Agam, Dhani, Royiv, Agus, Alan, Ade Ayu Winanda, Faradina dan kepada teman - teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah menjaga kalian wahai saudara seiman, dan semoga hidayah sunnah sampai kepada kalian.
14. Teman - teman Aktivistis Dakwah Kampus Universitas Lampung yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terkhusus untuk teman - teman FSPI FISIP, Fossi FH dan MPI Lampung atas kebersamaannya disaat menjalani proses dakwah di kampus Univeristas Lampung tercinta.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga karya sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, baik dalam kehidupan dunia maupun di dalam kehidupan akhirat. Aamiin.

Bandar Lampung, 05 Desember 2017

Penulis,

Ade Septiano Herlambang

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Desentralisasi Fiskal.....	10
B. Pengeluaran Pemerintah.....	11
1. Teori Makro Pengeluaran Pemerintah.....	12
1.1 Teori Rostow dan Musgrave.....	12
1.2 Teori Adolf Wagner.....	14
1.3 Teori Peacock Wiseman.....	17
2. Teori Mikro Pengeluaran Pemerintah.....	21
2.1 Penentuan Permintaan.....	21
2.2 Penentuan Tingkat Output.....	22
C. Belanja Daerah.....	23
D. Dana Alokasi Umum.....	24
E. Pendapatan Asli Daerah.....	27
F. <i>Flypaper Effect</i>	29
G. Penelitian Terdahulu.....	30
H. Kerangka Pemikiran.....	34
I. Hipotesis.....	35
III. METODE PENELITIAN	
A. Ruang Lingkup Penelitian.....	36
B. Populasi dan Sampel Penelitian.....	36
C. Jenis Penelitian dan Sumber Data.....	38
D. Batasan Variabel.....	38
E. Metode Analisis Data.....	40

1. Metode Estimasi Regresi Data Panel.....	40
1.1 Metode <i>Pooled Least Square</i>	40
1.2 Metode <i>Fixed Effect</i>	41
1.3 Metode <i>Random Effect</i>	42
2. Pemilihan Metode Regresi Data Panel.....	43
2.1 Uji <i>Chow</i>	43
2.2 Uji <i>Housman</i>	44
F. Pengujian Hipotesis.....	44
1. Uji t.....	44
2. Uji F.....	45
3. Koefisien Determinasi.....	45
G. Gambaran Umum Provinsi Lampung.....	45
1. Keadaan Geografis.....	45
2. Topografi.....	46
3. Administrasi Pemerintahan.....	46
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Tahapan Pengujian.....	49
1. <i>Pooled Least Square</i>	49
2. <i>Fixed Effect Model</i>	50
3. <i>Random Effect Model</i>	50
B. Uji Kriteria Pemilihan Model Penelitian.....	50
1. Uji Signifikansi <i>Fixed Effect (Uji Chow)</i>	50
2. Uji Signifikansi <i>Random Effect (Uji Hausman)</i>	51
3. Hasil Perhitungan Regresi.....	52
C. Uji Statistik.....	53
1. Uji Hipotesis / Uji T (Parsial).....	53
2. Uji F-statistik.....	54
D. Penafsiran Koefisien Determinasi (R^2).....	55
E. Pembahasan Hasil Penelitian.....	55
1. Interpretasi Hasil Regresi.....	55
1.1 Pengaruh PAD terhadap Belanja Pegawai Kab/Kota di Provinsi Lampung.....	55
1.2 Pengaruh DAU terhadap Belanja Pegawai Kab/Kota di Provinsi Lampung.....	57
1.3 Pembahasan tentang fenomena <i>flypaper effect</i> pada Kab/Kota di Provinsi Lampung.....	57
2. Analisis Intersep Model Regresi <i>Fixed Effect</i>	59
V. SIMPULAN DAN SARAN	62
A. Simpulan.....	62
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1	Perkembangan PAD dan DAU Kabupaten / Kota di Provinsi Lampung.....	3
Tabel 2	Kontribusi PAD, DAU, DBH, DAK terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung..	4
Tabel 3	Data Total & Tingkat Pertumbuhan Belanja Pegawai Kab/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2006 – 2016..	5
Tabel 4	Penelitian Terdahulu.....	30
Tabel 5	Variabel Dalam Penelitian.....	38
Tabel 6	Luas Wilayah.....	46
Tabel 7	Hasil <i>Uji Chow</i>	51
Tabel 8	Hasil <i>Uji Hausman</i>	51
Tabel 9	Hasil Estimasi Data Panel <i>FEM</i>	52
Tabel 10	Uji Hipotesis / Uji t.....	53
Tabel 11	Uji F-Statistic.....	54
Tabel 12	Nilai Koefisien <i>Fixed Effect</i>	59

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1	Kurva Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Nasional berdasarkan Hukum Wagner (I)..... 15
Gambar 2	Kurva Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Nasional berdasarkan Hukum Wagner (II)..... 16
Gambar 3	Kurva Teori Peacock dan Wiseman..... 19
Gambar 4	Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Berdasarkan Pendapat Rostow Musgrave dan Peacock Wiseman..... 20
Gambar 5	Skema Kerangka Pemikiran 34

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Data Penelitian.....	L1
<i>Pooled Least Square Model</i>	L2
<i>Fixed Effect Model</i>	L3
<i>Random Effect Model</i>	L4
Uji Chow.....	L5
Uji Hausman.....	L6

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tahun 2001 merupakan awal dimulainya desentralisasi fiskal di Negara Indonesia. Pelaksanaan desentralisasi merupakan wujud adanya tuntutan pemberlakuan dan pemberian otonomi yang luas kepada tiap daerah. Hal tersebut tertuang dalam peraturan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang peraturan pemerintah daerah. Untuk menjalankan pelaksanaan kewenangan pemerintah di daerah, pemerintah pusat mentransfer dana desentralisasi yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2004. Pemerintah daerah juga memiliki sumber pendanaan untuk melaksanakan kewenangannya berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat berupa : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan lain-lain yang sah, (UU Nomor 33 Tahun 2004). Tujuan dari transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah daerah, (Simanjuntak, 2001). Pemerintah daerah diharapkan dapat mengalokasikan dana transfer pada

sektor - sektor yang produktif, agar dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat dapat menjadi sumber penerimaan yang baru bagi daerah.

Armawaddin 2015, berpendapat bahwa permasalahan pembiayaan pembangunan bersumber dari bantuan dana transfer. Hal tersebut terjadi karena pemerintah daerah terlalu menggantungkan transfer pemerintah pusat untuk membiayai belanja daerah. Kuncoro 2004, menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah sebesar 20%. Keadaan ini menunjukkan pada perilaku pemerintah daerah yang asimetris. Perilaku yang tidak seharusnya terjadi pada pengeluaran pemerintah daerah. Menggunakan dana transfer dari pusat untuk membiayai pengeluaran daerah, dan dikhawatirkan akan timbul ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam jangka panjang.

Lampung merupakan propinsi yang daerahnya mengalami proses pemekaran. Proses pemekaran telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Lampung sejak tahun 1991. Pemerintah pusat dalam hal ini berperan untuk mengalokasikan dana transfer ke tiap daerah hasil dari pemekaran sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Hal tersebut untuk membantu pemerintah daerah dalam mengatur kewenangan di daerahnya. Dengan diterapkannya otonomi daerah, pemerintah Provinsi Lampung diharapkan mampu mengoptimalkan sumber penerimaan daerah yang terkandung di wilayahnya. Menempatkannya kedalam sumber - sumber yang produktif, sehingga ketergantungan fiskal Provinsi Lampung terhadap pemerintah pusat dapat berkurang. Berikut ini tabel perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung.

Tabel 1. Perkembangan PAD dan DAU Kab/Kota di Provinsi Lampung

Tahun	PAD (Juta Rupiah)	Tingkat Pertumbuhan PAD (%)	DAU (Juta Rupiah)	Tingkat Pertumbuhan DAU (%)
2006	167,539.32	-	3,800,622.50	-
2007	227,548.64	35,81	4,209,108.00	10,74
2008	231,669.73	1,81	4,632,020.78	10,04
2009	300,552.51	29,73	4,555,821.80	-1,64
2010	284,242.01	-5,42	4,300,198.99	-5,61
2011	451,339.05	58,78	5,074,075.07	17,99
2012	676,558.39	49,90	6,039,721.53	19,03
2013	777,572.44	14,93	6,393,166.72	5,85
2014	1,030,013.34	32,46	7,305,019.00	14,26
2015	1,131,255.72	9,82	7,689,971.87	5,27
2016	1,377,957.55	21,80	8,507,435.28	10,63

Sumber : Direktorat Jendral Perimbangan dan Keuangan (DJPK), data diolah.

Dari Tabel 1 menjelaskan bahwa tingkat pertumbuhan Dana Alokasi Umum (DAU) pada kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2007 – 2010, tahun 2012 – 2013, dan tahun 2014 - 2015 mengalami penurunan, sedangkan tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berfluktuatif pada tiap tahunnya. Tentunya hal ini dapat memberikan kemungkinan bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap pusat semakin berkurang, akan tetapi alokasi dari Dana Alokasi Umum (DAU) dari tahun 2006 - 2016 masih mengalami peningkatan. Sehingga ada kontradiksi bahwa pemerintah daerah masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, ditandai oleh alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang cenderung meningkat dari tiap tahunnya. Berikut ini merupakan data kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah Kab/Kota di Provinsi Lampung :

Tabel 2. Kontribusi PAD, DAU, DBH dan DAK terhadap Belanja Daerah

Tahun	Kontribusi PAD Terhadap Belanja Daerah (%)	Kontribusi DAU Terhadap Belanja Daerah (%)	Kontribusi DBH Terhadap Belanja Daerah (%)	Kontribusi DAK Terhadap Belanja Daerah (%)
2006	3,43	77,87	6,60	6,44
2007	3,74	69,20	8,42	7,63
2008	3,57	71,55	10,12	7,66
2009	4,62	70,12	6,70	9,15
2010	4,16	62,99	7,32	6,33
2011	5,36	60,32	7,89	7,36
2012	6,90	61,60	7,23	7,80
2013	7,63	62,76	5,33	6,70
2014	9,03	64,09	5,34	6,32
2015	8,72	59,33	3,11	7,90
2016	8,23	50,82	3,67	16,9
Rata – rata	5,94	64,60	6,52	8,19

Sumber : Direktorat Jendral Perimbangan dan Keuangan (DJPK), data diolah.

Pada Tabel 2, menjelaskan bahwa rata - rata kontribusi Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja daerah tahun 2006 - 2016 sebesar 64,60 persen, sementara rata - rata kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2006 - 2016 hanya 5,94 persen terhadap belanja daerah. Keadaan tersebut mengindikasikan bahwa kecenderungan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja daerah di tiap tahunnya masih mengalami peningkatan, sehingga ada kemungkinan bahwa respon pemerintah daerah terhadap penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja daerah masih lebih dominan dibandingkan dengan penggunaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja daerah. Pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan daerahnya masih mengandalkan transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 64,60 % di tahun 2006 - 2016. Keadaan tersebut berdasarkan pada pengeluaran alokasi belanja daerah. Hal ini dapat menimbulkan

indikasi dari pemborosan anggaran yang tercermin pada pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dengan menggunakan realisasi dari belanja pegawai yang merupakan sub bagian dari alokasi belanja daerah, yang tercermin pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), penulis ingin menganalisis apakah indikasi dari pemborosan anggaran dapat tercermin pada variabel tersebut.

Tabel 3. Data Total & Tingkat Pertumbuhan Belanja Pegawai Kab/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2006 - 2016

Tahun	Total Belanja Pegawai	Tingkat Pertumbuhan Belanja Pegawai %
2006	2.257.796,93	-
2007	2.793.989,96	23,75
2008	3.435.611,47	22,96
2009	3.815.871,37	11,07
2010	4.284.740,14	12,29
2011	4.955.925,77	15,66
2012	5.836.650,17	17,77
2013	6.082.377,10	4,21
2014	4.565.403,67	(24,94)
2015	5.883.958,58	28,88
2016	8.374.129,24	42,32

Sumber : Direktorat Jendral Perimbangan dan Keuangan (DJPK), data diolah.

Total realisasi dari belanja pegawai di tahun 2006 – 2013 mengalami peningkatan di tiap tahunnya, dan di tahun 2014 realisasi dari belanja pegawai mengalami penurunan, akan tetapi di tahun setelahnya, baik di tahun 2015 – 2016 mengalami peningkatan kembali. Sedangkan jika dilihat dari tingkat pertumbuhan belanja pegawai di tahun 2006 – 2016 mengalami fluktuatif di tiap tahunnya. Ketergantungan dalam penggunaan dana transfer menimbulkan perilaku asimetris pada pengeluaran pemerintah daerah (Kuncoro, 2004). Perilaku asimetris terjadi saat pemerintah daerah terlalu menggantungkan Dana Alokasi Umum (DAU)

untuk membiayai belanja daerah, tanpa mengoptimalkan potensi yang di miliki daerah (Wulan, 2008). Perilaku asimetris ini memicu adanya fenomena yang dinamakan sebagai *flypaper effect*. Maimunah (2006), menyatakan bahwa *flypaper effect* disebut sebagai suatu kondisi yang terjadi saat pemerintah daerah merespon (belanja) lebih banyak (lebih boros) dengan menggunakan dana transfer (*grants*) yang diprosikan dengan Dana Alokasi Umum (DAU) daripada menggunakan kemampuan sendiri, diprosikan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Afrizawati (2012), berpendapat tentang *flypaper effect* dapat dideteksi melalui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja daerah. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dalam jangka panjang dapat mengganggu kemampuan daerah dalam membiayai pengeluaran daerahnya disaat penerimaan daerah yang bersumber pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak mampu dikelola dengan baik, sehingga hal ini mengindikasikan terjadinya fenomena *flypaper effect*. Maimunah (2006), berpendapat bahwa deteksi terhadap *flypaper effect* dapat diperoleh melalui : pertama, nilai koefisien transfer Dana Alokasi Umum (DAU) lebih besar dari nilai koefisien Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan keduanya signifikan, atau kedua, Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak signifikan.

Selanjutnya menurut Halim (2002), permasalahan yang dihadapi daerah terkait dengan penggalan sumber - sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain : pajak dan retribusi daerah, ke dua sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini masih belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan dan penerimaan daerah secara keseluruhan. Kuncoro (2004), menyebutkan bahwa rata

- rata Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya mampu membiayai pemerintah daerah paling besar 20 persen saja. Kenyataan inilah yang menimbulkan perilaku asimetris pada pemerintah daerah. Keadaan diatas memperlihatkan bahwa perilaku fiskal pemerintah daerah dalam merespon transfer dari pusat menjadi determinan penting dalam menunjang efektivitas kebijakan transfer.

Pada penelitian sebelumnya, menjelaskan bahwa respons pemerintah lebih besar akan penggunaan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) untuk belanja daerah jika dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja daerah (Maimunah, 2006). Tentunya hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan penerapan desentralisasi melalui otonomi daerah. Daerah diharapkan dapat menumbuhkan kemandiriannya dalam menggali potensi penerimaan daerahnya. Sehingga permasalahan yang terjadi saat ini, pemerintah daerah terlalu berlebihan atau terlalu mengandalkan penggunaan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) untuk membiayai belanja daerah, sementara optimalisasi potensi yang dimiliki daerah yang bersumber pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam tentang fenomena *flypaper effect* ini, pada pola pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kab/kota se-Provinsi Lampung. Sehingga dalam penelitian ini, berjudul tentang **“Fenomena *Flypaper Effect* Pada Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2006 - 2015”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah dana transfer DAU dan PAD berpengaruh terhadap belanja Pegawai Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2006 - 2015 ?
2. Apakah *flypaper effect* terjadi pada pola pengeluaran APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2006 - 2015 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh dana transfer DAU dan PAD terhadap belanja Pegawai Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2006 - 2015.
2. Mengetahui dan menganalisis apakah *flypaper effect* terjadi pada pola pengeluaran APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2006 - 2015.

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi penelitian - penelitian selanjutnya, khususnya bagi kalangan mahasiswa dan praktisi yang tertarik dengan bidang ilmu ini.
3. Untuk memberikan masukan dan sebagai bahan pertimbangan baik kepada Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam hal penyusunan kebijakan di masa yang akan datang.

E. Sistematika Penulisan

BAB 1

Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2

Tinjauan pustaka yang menguraikan teori - teori yang melandasi atau mendukung penelitian ini yang diperoleh dari literatur dan sumber lainnya, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB 3

Metodologi penelitian yang menguraikan bagaimana penelitian ini dilakukan yang terdiri dari jenis dan sumber data, definisi operasional variabel yang diteliti, metode analisis, prosedur analisis data dan uji hipotesis.

BAB 4

Hasil dan pembahasan dari pengujian yang telah dilakukan.

BAB 5

Kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Desentralisasi Fiskal

Menurut Undang - Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang - Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa “Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Mardiasmo (2002) mengatakan bahwa, ada dua manfaat yang dapat diharapkan dari desentralisasi yaitu :

1. Mendorong partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat di dalam pembangunan serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah.
2. Memperbaiki alokasi sumber daya produktif, melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap.

Suparmoko 2002, menjelaskan bahwa tujuan kebijakan desentralisasi adalah :

1. Mewujudkan keadilan antara kemampuan dan hak daerah.
2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengurangan subsidi dari pemerintah pusat.

3. Mendorong pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi masing-masing daerah.

Pengertian dan konsep desentralisasi fiskal menurut Sidik (2001), desentralisasi fiskal adalah suatu alat untuk mencapai salah satu tujuan negara, yaitu terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Menurut Robert Simanjuntak (2002) sasaran desentralisasi fiskal di Indonesia secara umum adalah:

1. Untuk memenuhi aspirasi daerah menyangkut penguasaan atas sumber sumber keuangan daerah.
2. Mendorong akuntabilitas, dan transparansi pemerintah daerah.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah.
4. Mengurangi ketimpangan antar daerah.
5. Menjamin terselenggaranya pelayanan publik minimum di setiap daerah.
6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum.

B. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, maka pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Mangkoesebroto, 1994).

Teori mengenai pengeluaran pemerintah dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu teori makro dan teori mikro (Mangkoesebroto, 1994).

1. Teori Makro Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan (Suparmoko,1987). Boediono (1999) mengungkapkan bahwa dalam teori ekonomi makro, pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga pos utama yang dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa.
- b. Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai. Perubahan gaji pegawai mempunyai pengaruh terhadap proses makro ekonomi, di mana perubahan gaji pegawai akan mempengaruhi tingkat permintaan secara tidak langsung.
- c. Pengeluaran pemerintah untuk transfer payment. Transfer payment bukan pembelian barang atau jasa oleh pemerintah dipasar barang melainkan mencatat pembayaran atau pemberian langsung kepada warganya yang meliputi misalnya pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat, pembayaran pensiun, pembayaran bunga untuk pinjaman pemerintah kepada masyarakat. Secara ekonomis transfer payment mempunyai status dan pengaruh yang sama dengan pos gaji pegawai meskipun secara administrasi keduanya berbeda (Boediono, 1999).

1.1 Teori Rostow dan Musgrave

Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahapan-tahapan pembangunan ekonomi yaitu tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, menurut mereka rasio pengeluaran pemerintah terhadap

pendapatan nasional relatif besar. Hal ini dikarenakan pada tahap ini persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sehingga pemerintah harus menyediakan berbagai sarana dan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi dan sebagainya (Dumairy, 1997).

Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan guna memacu pertumbuhan agar dapat lepas landas. Namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin membesar. Peranan pemerintah tetap besar pada tahap menengah, oleh karena peranan swasta yang semakin besar ini banyak menimbulkan kegagalan pasar dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik. Selain itu, pada tahap ini perkembangan ekonomi menyebabkan terjadinya hubungan antar sektor yang semakin rumit. Misalnya pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan oleh perkembangan sektor industri, menimbulkan semakin tingginya tingkat pencemaran udara dan air sehingga pemerintah harus turun tangan untuk mengatur dan mengurangi akibat negatif dari polusi itu terhadap masyarakat. Pemerintah juga harus melindungi buruh yang berada dalam posisi yang lemah agar dapat meningkatkan kesejahteraan mereka (Basri, 2005).

Dalam satu proses pembangunan menurut Musgrave, rasio investasi swasta terhadap *Gross National Product* (GNP) semakin besar. Tetapi rasio investasi pemerintah terhadap GNP akan semakin kecil. Sementara itu, Rostow berpendapat bahwa pada tahap lanjut pembangunan terjadi peralihan aktivitas pemerintah dari penyediaan prasarana ekonomi ke pengeluaran untuk layanan

sosial seperti program kesejahteraan hari tua, program pendidikan, program pelayanan kesehatan masyarakat dan sebagainya (Dumairy, 1997).

Teori Rostow dan Musgrave adalah pandangan yang timbul dari pengamatan atas pengalaman pembangunan ekonomi yang dialami banyak negara tetapi tidak disadari oleh suatu teori tertentu. Selain tidak jelas apakah tahap pertumbuhan ekonomi terjadi dalam tahap demi tahap atau beberapa tahap dapat terjadi secara simultan (Mangkoesoebroto, 1994).

1.2 Teori Adolf Wagner

Pengamat empiris oleh Adolf Wagner terhadap negara-negara Eropa, Amerika Serikat dan Jepang pada abad ke 19 menunjukkan bahwa aktivitas pemerintah dalam perekonomian cenderung semakin meningkat. Wagner mengukur perbandingan pengeluaran pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dengan mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentase terhadap PDB (Dumairy, 1997). Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya (Mangkoesoebroto, 1994). Temuannya kemudian oleh Richard A. Musgrave dinamakan Hukum Pengeluaran Pemerintah yang selalu Meningkat (*The Law of Growing Public Expenditure*). Sedangkan Wagner sendiri menamakannya sebagai Hukum Wagner yaitu Hukum Aktivitas Pemerintah yang selalu Meningkat (*The Law of Ever Increasing State Activity*) (Dumairy, 1997).

Menurut Mangkoesoebroto (1994) Hukum tersebut dapat dirumuskan dengan notasi:

$$\frac{GpCt}{YpCt} > \frac{GpCt-1}{YpCt-1} > \frac{GpCt-2}{YpCt-2} > \dots > \frac{GpCt-n}{YpCt-n}$$

Di mana :

GpC : Pengeluaran pemerintah perkapita

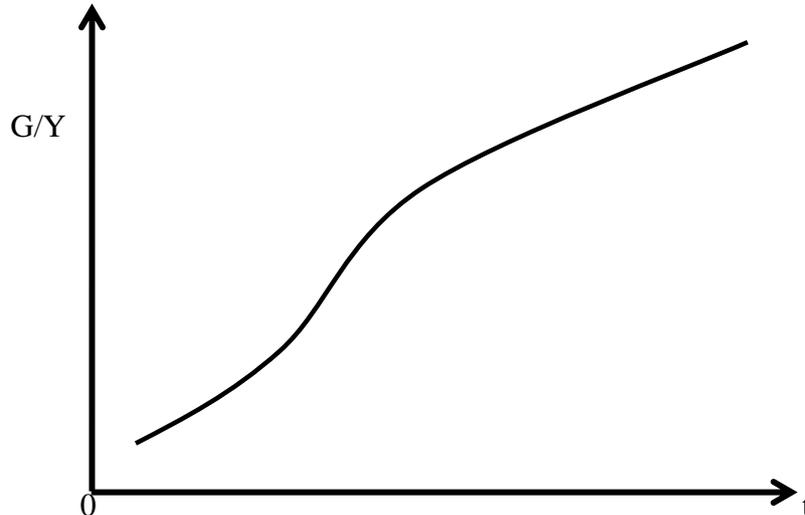
YpC : Produk atau pendapatan nasional per kapita

t : Indeks waktu

Hukum tersebut memberi dasar akan timbulnya kegagalan pasar dan eksternalitas.

Sehingga Wagner menyadari bahwa dengan bertumbuhnya perekonomian akan menyebabkan hubungan antara industri dengan industri dan hubungan industri dengan masyarakat akan semakin rumit dan kompleks. Sehingga potensi terjadinya kegagalan eksternalitas negatif semakin besar (Mangkoesoebroto, 1994). Secara grafik rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional (GpC/YpC) atau (G/Y) ditunjukkan oleh sebuah kurva eksponensial sebagai berikut:

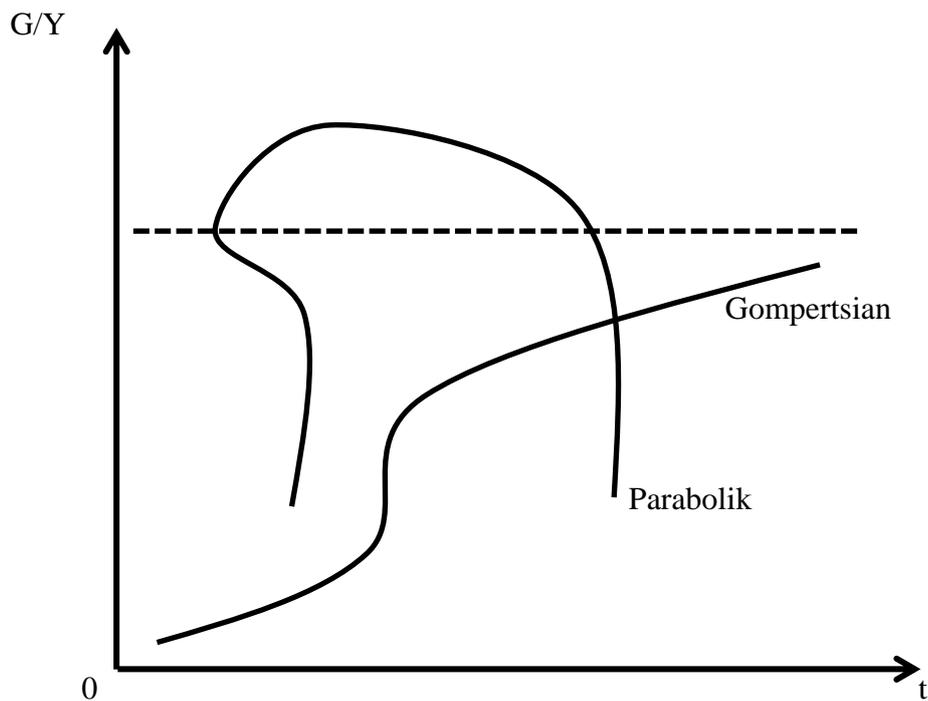
berikut:



Sumber: *Ekonomi Publik Edisi 3, Mangkoesoebroto*

Gambar 1. Kurva Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Nasional berdasarkan Hukum Wagner (I)

Persoalan yang belum terpecahkan ialah apakah dalam jangka panjang kurva tersebut akan berpola gompertsian (berarti sampai dengan suatu titik tertentu rasio G/Y akan kembali menurun) sebagaimana yang diperlihatkan oleh gambar kurva Gompertsian di bawah ini (Dumairy, 1997).



Sumber: *Ekonomi Publik Edisi 3, Mangkoesoebroto*

Gambar 2. Kurva Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Nasional berdasarkan Hukum Wagner (II)

Hukum Wagner terdapat kelemahan yaitu tidak didasarkan pada suatu teori pemilihan barang publik. Tetapi Wagner mendasarkan pandangannya pada suatu teori yang disebut *organic theory of state* yaitu teori organis yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak terlepas dengan masyarakat lain. Sebagaimana ditunjukkan dalam gambar sebagai berikut: secara relatif peranan pemerintah semakin meningkat (Mangkoesoebroto, 1994).

1.3 Teori Peacock Wiseman

Peacock dan Wiseman adalah dua orang yang mengemukakan teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang terbaik. Peacock dan Wiseman mengemukakan pendapat lain dalam menerangkan perilaku perkembangan pemerintah. Mereka mendasarkannya pada suatu analisis penerimaan pengeluaran pemerintah. Pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan memperbesar penerimaan dari pajak. Padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang besar (Mangkoesoebroto, 1994).

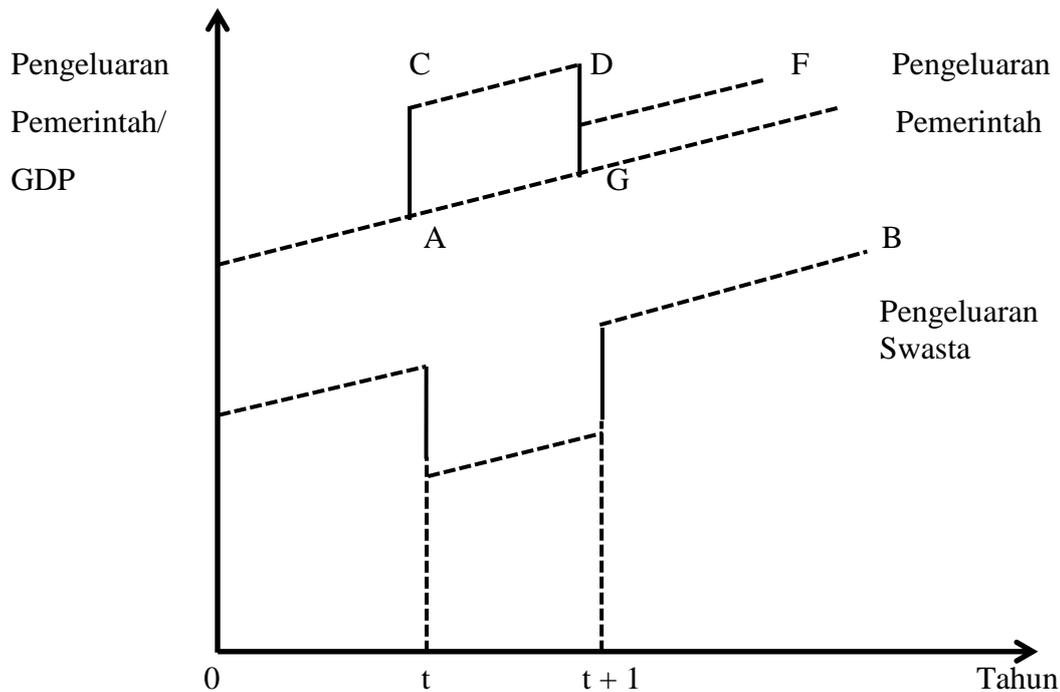
Dalam Basri (2005), Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak. Tingkat toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena. Menurut Peacock dan Wiseman adalah pertumbuhan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat.

Jadi dalam keadaan normal, kenaikan *Product Domestic Bruto* (PDB) menyebabkan baik penerimaan maupun pengeluaran pemerintah. Apabila keadaan normal jadi terganggu, katakanlah karena perang atau eksternalitas lain, maka pemerintah terpaksa harus memperbesar pengeluarannya untuk mengatasi

gangguan tersebut. Konsekuensinya timbul tuntutan untuk memperoleh penerimaan pajak lebih besar. Pungutan pajak yang lebih besar menyebabkan dana swasta untuk berinvestasi dan modal kerja menjadi berkurang. Efek ini disebut efek penggantian (*displacement effect*) yaitu adanya gangguan sosial menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah (Basri, 2005).

Dalam Mangkoesobroto (1994), Pengentasan gangguan tidak hanya cukup dibiayai semata-mata dengan pajak sehingga pemerintah harus meminjam dana dari luar negeri. Setelah gangguan teratasi muncul kewajiban melunasi utang dan membayar bunga. Pengeluaran pemerintah yang semakin bertambah bukan hanya karena *Gross National Product* (GNP) bertambah tetapi karena adanya kewajiban baru tersebut. Akibat lebih lanjut adalah pajak tidak menurun kembali ke tingkat semula meskipun gangguan telah berakhir. Selain itu, masih banyak aktivitas pemerintah yang baru kelihatan setelah terjadinya perang dan ini disebut efek inspeksi (*inspection effect*). Adanya gangguan sosial juga akan menyebabkan terjadinya konsentrasi kegiatan ke tangan pemerintah yang sebelumnya dilaksanakan oleh swasta. Efek inilah disebut sebagai efek konsentrasi (*concentration effect*).

Dengan adanya ketiga efek tersebut menyebabkan bertambahnya aktivitas pemerintah sehingga setelah perang selesai tingkat pajak tidak menurun kembali pada tingkat sebelum terjadi perang. Jadi berbeda dengan pandangan Wagner, perkembangan pengeluaran pemerintah versi Peacock dan Wiseman tidaklah berbentuk suatu garis, tetapi seperti tangga. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut ini: (Mangkoesobroto, 1994).

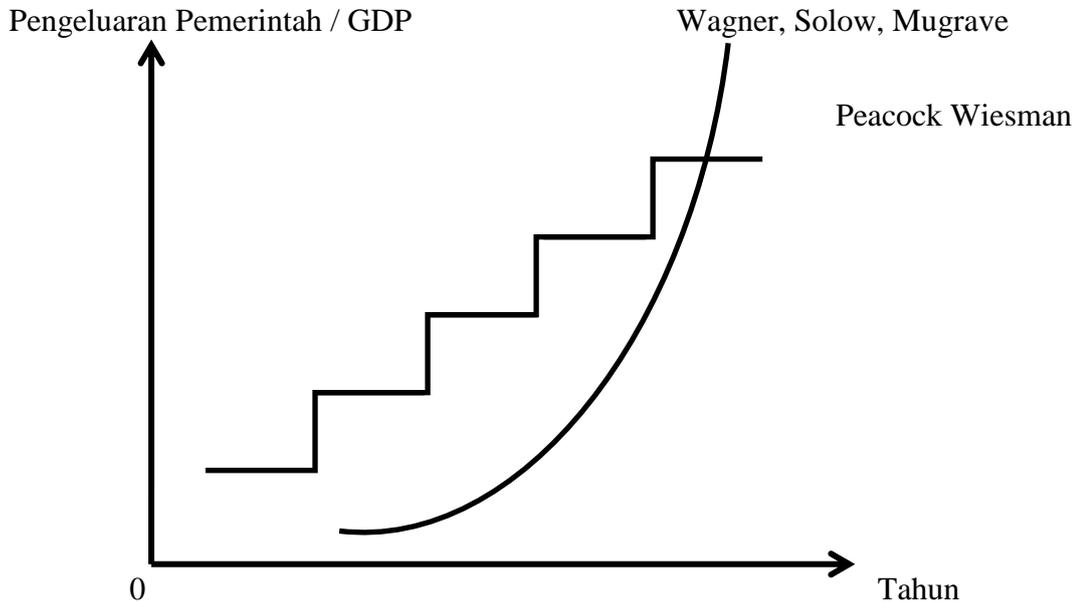


Gambar 3. Kurva Teori Peacock dan Wiseman

Sumber: Mangkoesebroto, 1994.

Dalam keadaan normal, t ke $t+1$, pengeluaran pemerintah dalam persentase terhadap GNP meningkat sebagaimana yang ditunjukkan garis AG. Apabila pada tahun t terjadi perang maka pengeluaran pemerintah meningkat sebesar AC dan kemudian meningkat seperti yang ditunjukkan pada segmen CD. Setelah perang selesai pada tahun $t+1$, pengeluaran pemerintah tidak menurun ke G. Hal ini disebabkan setelah perang, pemerintah membutuhkan tambahan dana untuk mengembalikan pinjaman pemerintah yang digunakan dalam pembiayaan pembangunan. Kenaikan tarif pajak tersebut dimaklumi oleh masyarakat sehingga tingkat toleransi pajak meningkat dan pemerintah dapat memungut pajak yang lebih besar tanpa menimbulkan gangguan dalam masyarakat. Secara grafik, perkembangan pengeluaran pemerintah versi Peacock dan Wiseman bukanlah berpola seperti kurva mulus berslope positif sebagaimana tersirat dalam pendapat

Rostow dan Musgrave. Melainkan berslope positif dengan bentuk patah-patah seperti tangga yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Sumber: *Ekonomi Publik Edisi 3, Mangkoesoebroto*

Gambar 4. Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Berdasarkan Pendapat Rostow Musgrave dan Peacock Wiseman

Dalam Mangkoesoebroto (1994), Bird mengkritik hipotesa yang dikemukakan oleh Peacock dan Wiseman. Bird menyatakan bahwa selama terjadinya gangguan sosial memang terjadi pengalihan aktivitas pemerintah dari pengeluaran sebelum gangguan ke pengeluaran yang berhubungan dengan gangguan tersebut. Hal ini akan diikuti oleh peningkatan persentase pengeluaran pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Akan tetapi setelah terjadinya gangguan, persentase pengeluaran pemerintah terhadap PDB akan menurun secara perlahan-lahan kembali ke keadaan semula. Jadi

menurut Bird, efek pengalihan merupakan gejala dalam jangka pendek, tetapi tidak terjadi dalam jangka panjang.

2. Teori Mikro Pengeluaran Pemerintah

Tujuan dari teori mikro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi antara permintaan dan penawaran akan barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Jumlah barang publik yang akan disediakan tersebut, selanjutnya akan menimbulkan permintaan akan barang lain. Sebagai contoh, misalnya pemerintah menetapkan akan membuat sebuah pelabuhan udara baru. Pelaksanaan pembuatan pelabuhan baru tersebut menimbulkan permintaan akan barang lain yang dihasilkan oleh sektor swasta seperti semen, baja, alat-alat pengangkutan dan sebagainya (Basri, 2005). Dalam Basri (2005), teori mikro mengenai pengeluaran pemerintah dapat dirumuskan sebagai berikut:

2.1 Penentuan Permintaan

$$U_i = f(G, X)$$

Di mana:

- G = Vektor dari barang publik
- X = Vektor dari barang swasta
- i = Individu
- U = Fungsi utilitas

Seorang individu mempunyai permintaan akan barang publik dan swasta.

Akan tetapi, permintaan efektif akan barang tersebut (pemerintah dan swasta) tergantung pada kendala anggaran (*budget constraints*). Misalkan seorang

individu (i) membutuhkan barang publik (K) sebanyak G_{ik} . Untuk menghasilkan barang K sebanyak G_k , pemerintah harus mengatur sejumlah kegiatan. Misalnya pemerintah berusaha untuk meningkatkan penjagaan keamanan. Dalam pelaksanaan usaha meningkatkan keamanan tersebut tidak mungkin bagi pemerintah untuk menghapuskan sama sekali angka kejahatan. Karena itu, pemerintah dan masyarakat harus menetapkan suatu tingkat keamanan yang dapat ditolerir oleh masyarakat. Suatu tingkat keamanan tertentu dapat dicapai dengan berbagai kombinasi aktivitas atau dengan menggunakan berbagai fungsi produksi (Basri, 2005).

Dalam Mangkoesobroto (1994) Perkembangan pengeluaran pemerintah dapat dijelaskan dengan beberapa faktor dibawah ini yaitu:

- Perubahan permintaan akan barang publik.
- Perubahan dari aktivitas pemerintah dalam menghasilkan barang publik dan juga perubahan dari kombinasi faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi.
- Perubahan kualitas barang publik.
- Perubahan harga faktor produksi.

2.2 Penentuan Tingkat Output

Barang dan jasa publik yang disediakan oleh pemerintah ditentukan oleh politisi yang memilih jumlah barang dan jasa yang dihasilkan. Disamping itu, para politisi juga menentukan jumlah pajak yang akan dikenakan kepada masyarakat untuk membiayai barang dan jasa publik tersebut dalam

menentukan jumlah barang dan jasa yang akan disediakan. Para politisi memperhatikan selera atau keinginan masyarakat, agar masyarakat merasa puas dan tetap memilih mereka dalam sebagai wakil masyarakat. Fungsi utilitas para politisi adalah sebagai berikut (Basri, 2005):

$$U_p = g(X, G, S)$$

Di mana:

- U_p = Fungsi utilitas
- S = Keuntungan yang diperoleh politisi dalam bentuk materi/kedudukan
- G = Vektor barang publik
- X = Vektor barang swasta

C. Belanja daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran Pemerintah Daerah pada suatu periode anggaran. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang, “Belanja Daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”. Belanja Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Halim (2002), mengemukakan bahwa belanja daerah merupakan penurunan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau Depkes aset, atau terjadinya utang yang mengakibatkan

berkurangnya ekuitas dana, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada peserta ekuitas dana.

D. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAAU dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota". Tampubolon (2011), DAAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. DAAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*).

Didalam Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sumber penerimaan daerah dalam konteks otonomi dan desentralisasi untuk saat ini masih sangat di dominasi oleh bantuan dan sumbangan dari pemerintah pusat baik dalam bentuk DAAU, DAK dan bagi hasil, sedangkan PAD masih relatif kecil (Mardiasmo, 2002). Berdasarkan undang-undang ini, kebutuhan DAAU oleh suatu daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) ditentukan dengan menggunakan pendekatan *fiscal gap*, dimana kebutuhan DAAU suatu daerah ditentukan atas kebutuhan daerah dengan potensi daerah. DAAU digunakan untuk menutup celah

yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada.

Menurut Kuncoro (2004) “DAU merupakan *blok grants* yang diberikan kepada semua dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya, dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak daripada daerah kaya”.

Kuncoro (2004), berpendapat bahwa DAU dapat diartikan sebagai berikut :

1. Salah satu komponen dari Dana Perimbangan pada APBN, yang pengalokasiannya didasarkan atas konsep Kesenjangan Fiskal atau Celah Fiskal (*fiscal gap*), yaitu selisih antara kebutuhan Fiskal dengan Kapasitas Fiskal.
2. Instrumen untuk mengatasi *horizontal imbalance*, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah dimana penggunaannya ditetapkan sepenuhnya oleh daerah.
3. *Equalization Grant*, yaitu berfungsi untuk menetralisasi ketimpangan kemampuan keuangan dengan adanya PAD, Bagi Hasil, dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) yang diperoleh daerah.

Kemudian, mengacu pada PP No.104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan, DAU ditunjukkan untuk : (a) *horizontal equity* dan (b) *sufficiency*. *Horizontal equity* merupakan kepentingan pemerintah pusat dalam rangka melakukan distribusi pendapatan secara adil dan merata agar tidak terjadi kesenjangan yang lebar antar daerah. Sementara itu, kecukupan (*sufficiency*) menjadi kepentingan

daerah untuk menutup *fiscal gap*. Adapun cara menghitung DAU menurut ketentuan adalah sebagai berikut (Halim, 2002) :

1. DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26 % dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
2. DAU untuk daerah propinsi dan untuk kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari DAU sebagaimana ditetapkan diatas.
3. DAU untuk suatu Kabupaten/Kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah DAU untuk kabupaten/kota yang ditetapkan APBN dengan porsi kabupaten/kota yang bersangkutan.

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, proporsi DAU untuk daerah provinsi, kabupaten, dan kota ditetapkan sebagai berikut :

1. Untuk daerah provinsi sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah keseluruhan DAU.
2. Untuk daerah kabupaten dan kota sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah keseluruhan DAU.

Menurut Pramuka (2010), Daerah yang mempunyai kapasitas fiskal tinggi justru akan mendapat jumlah DAU yang lebih kecil, sehingga diharapkan dapat mengurangi ketidakseimbangan fiskal antardaerah dalam menjalani era otonomi sekarang. Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan imbalan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota. DAU diprioritaskan penggunaannya untuk mendanai gaji dan tunjangan pegawai, kesejahteraan pegawai, kegiatan operasi dan pemeliharaan serta pembangunan

fisik sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum yang dibutuhkan masyarakat.

E. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari berbagai usaha pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin maupun pembangunannya, yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha milik daerah, dan lain-lain penerimaan asli daerah yang sah (Rusydi, 2010). Menurut Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari :

1. Hasil pajak daerah.
2. Hasil retribusi daerah.
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan; dan
4. Penerimaan dari dinas dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat dijelaskan :

1. Pajak Daerah

Pajak merupakan iuran yang dapat dipaksakan kepada wajib pajak oleh pemerintah dengan balas jasa yang tidak langsung dapat ditunjuk. Pada pokoknya pajak memiliki dua peranan utama yaitu sebagai sumber penerimaan negara (fungsi budget) dan sebagai alat untuk mengatur (fungsi regulator) (Miyasto, 2009). Menurut Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi

atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan paksa yang dilakukan pemerintah daerah terhadap wajib retribusi dengan kontraprestasi langsung yang diberikan pemerintah daerah kepada wajib retribusi (Miyasto, 2009). Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah, menyebutkan bahwa retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian jin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Menurut UU Nomor 34 Tahun 2000 retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

3. Bagian Laba Perusahaan Daerah

Sumber pendapatan asli daerah yang ketiga adalah laba dari perusahaan daerah. Karena berbentuk perusahaan, maka prinsip pengelolaannya berdasarkan atas asas-asas ekonomi perusahaan. Dengan demikian perusahaan harus mencari keuntungan dan selanjutnya sebagian dari keuntungan tersebut diserahkan ke kas daerah. Miyasto (2009), mengatakan bahwa perusahaan daerah merupakan salah satu komponen yang diharapkan dalam memberikan kontribusinya bagi

pendapatan daerah, tapi sifat utama dari perusahaan daerah bukanlah berorientasi pada keuntungan, akan tetapi justru dalam memberikan jasa dan menyelenggarakan kemanfaatan umum, atau dengan perkataan lain perusahaan daerah menjelaskan fungsi ganda yang harus terjamin keseimbangannya yaitu fungsi ekonomi.

4. Pendapatan lain-lain yang sah

Pendapatan lain-lain yang disahkan penerimaan lain-lain, dilain pihak adalah penerimaan pemerintah daerah diluar penerimaan-penerimaan dinas, pajak, retribusi dan bagian laba perusahaan daerah, hasil penjualan barang-barang (bekas) milik daerah, penerimaan sewa kios milik daerah dan penerimaan uang langganan majalah daerah. Fungsi tambahan dari dinas-dinas daerah adalah memberikan pelayanan umum kepada masyarakat tanpa terlalu memperhitungkan untung dan ruginya, tetapi dalam batasan-batasan tertentu dapat didayagunakan untuk bertindak sebagai organisasi ekonomi yang memberikan pelayanan dengan imbalan jasa. Penerimaan lain-lain membuka kemungkinan bagi pemerintah daerah untuk melakukan berbagai kegiatan yang menghasilkan baik yang berupa materi dalam hal kegiatan tersebut untuk menyediakan, melapangkan atau memantapkan suatu kebijakan pemerintah daerah dalam satu bidang tertentu (Miyasto, 2009).

F. Flypaper Effect

Sudrajat (2010), menyatakan bahwa *flypaper effect* merupakan suatu kondisi pada saat pemerintah daerah merespon berbeda (lebih boros) dalam menentukan belanja daerah dengan mendasarkan pada transfer dari pemerintah pusat dibandingkan dengan pendapatan asli daerahnya. Inman (2008), mengungkapkan

bahwa *flypaper effect* merupakan kondisi dimana transfer dari pemerintah pusat secara signifikan meningkatkan belanja publik jika dibandingkan dengan pendapatan daerah. Deni (2013), menyatakan bahwa *Flypaper effect* adalah fenomena penyimpangan dalam hubungan transfer keuangan pemerintah pusat dengan penerimaan atau pengeluaran pemerintah lokal, terjadi ketika pemerintah menerima *grant*, maka akan dipergunakan untuk meningkatkan pengeluarannya atau belanja tanpa meningkatkan pendapatan aslidaerah.

Ditemukannya fenomena *flypaper effect* mengidentifikasi bahwa pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan publik senantiasa cenderung merespon pengeluaran atau belanja daerahnya dari *grants* atau transfer dan lebih “berhemat” dalam optimalisasi pengeluaran yang berasal dari pendapatan asli daerahnya yang merupakan hasil dari kenaikan pendapatan domestik bruto. Hal ini yang pada akhirnya dapat menciptakan kecenderungan pemborosan belanja daerah (Aulia, 2013).

G. Penelitian Terdahulu

Tabel 4. Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul Penelitian	Alat dan Model Analisis	Hasil Penelitian
Armawaddin, (2015)	Analisis Flypaper Effect Pada Belanja Daerah Kab/Kota di Sulawesi Tenggara (Jurnal Ekonomi Pembangunan)	Metode Regresi Linier Berganda. $Y_{it} = \alpha_{it} + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + u_{it}$ Keterangan : Y = Belanja Daerah X1 = Dana Alokasi Umum X2 = Pendapatan Asli daerah i = kabupaten/kota	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : dalam periode 2010-2013 terdeteksi adanya flypaper effect pada belanja daerah Kab/Kota di Sulawesi Tenggara yang mengindikasikan bahwa terjadi inefisiensi dalam penggunaan belanja

			<p>t = waktu/periode α = konstanta β_1, β_2 = koefisien estimasi u = error term</p>	daerah.
Pramuka, (2010)	Flypaper Effect Pada Pengeluaran Pemerintah Daerah di Jawa (Jurnal Ekonomi Pembangunan)	Metode Regresi Linier Berganda.	$BD = \alpha + b_1 DAUt + b_2 PADt + e$ $BO = \alpha + b_1 DAUt-1 + b_2 PADt-1 + e$ $BM = \alpha + b_1 DAUt-1 + b_2 PADt-1 + e$	<p>Hasil penelitian ini menyatakan bahwa tidak ditemukan fenomena flypaper effect, yang mengisyaratkan bahwa pemerintah setempat tidak mengandalkan hibah dari pemerintah pusat sebagai sumber dari anggaran mereka. Variabel DAU dan PAD terbukti secara signifikan mempengaruhi operasi, modal dan total pengeluaran pemerintah daerah .</p>
Iskandar, (2012)	<i>Flypaper Effect</i> pada Unconditional Grand (Jurnal Ekonomi Pembangunan)	Metode Regresi Linear Berganda.	$BDit = f(UGit, PADit, PDRBit)$ Model di atas kemudian dispesifikasikan dalam bentuk model sebagai berikut: $BDit = b_0 + b_1 UGit + b_2 PADit + b_3 PDRBit$	<p>Hasil penelitian ini menyatakan bahwa unconditional grants dan PAD mempunyai hubungan yang positif dan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah , sedangkan PDRB mempunyai pengaruh yang signifikan namun bernilai negatif terhadap belanja daerah. Nilai koefisien PAD lebih besar dari unconditional grants dan keduanya signifikan sehingga pada penelitian ini</p>

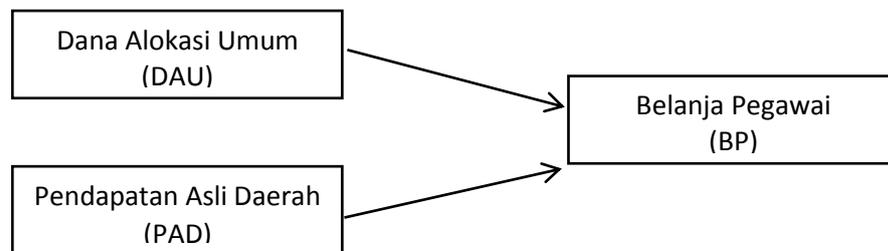
			tidak terbukti adanya fenomena flypaper effect.
Amril, (2015)	<i>Flypaper Effect</i> Pada Kinerja Keuangan Kab/Kota di Provinsi Jambi (Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah)	Metode Regresi Linier Berganda.	Hasil penelitian menemukan bahwa : variabel DBH, DAU, lag operasional dan dummy otonomi berpengaruh secara signifikan terhadap belanja operasional Kab/Kota di Jambi. Sedangkan hasil yang kedua bahwa : DBH, DAU, Pendapatan per kapita, dummy otonomi, berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal Kab/Kota di provinsi Jambi dan terbukti terjadi fenomena flypaper effect.
Afrizawati, (2012)	Analisis <i>Flypaper Effect</i> Pada Belanja Daerah Kab/Kota di Sumatera Selatan. (Jurnal Ekonomi)	Metode <i>purposive sampling</i> . $BD_{it} = a + b_1 DAU_{it} + b_2 PAD_{it} + e$ Dimana: BD_{it} = Jumlah Belanja Daerah (BD _t) a = Konstanta $b_1 b_2$ = Koefisien Regresi DAU_{it} = Jumlah DAU kabupaten i, tahun t PAD_{it} = Jumlah PAD kabupaten i, tahun t e = error term X = PAD b = koefisien regresi untuk masing-	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel DAU dan PAD secara signifikan berpengaruh terhadap Belanja Daerah di 7 Kab/Kota di Sumatera Selatan. Dalam penelitian ini terbukti adanya fenomena flypaper effect, dimana pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah lebih besar dibandingkan dengan pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah.

			masing variabel X e = koefisien eror	
Megasari, (2015)	Pengaruh PAD, Selisih Lebih Perhitungan Anggaran dan Flypaper Effect Pada Prilaku Oportunistik Penyusun Anggaran.		Metode Purposive Sampling. $Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + e$	Penelitian ini bertujuan untuk meneliti apakah PAD, SiLPA, dan <i>Flypaper Effect</i> berpengaruh pada terjadinya OPA. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah 9 APBD Kabupaten/Kota di Bali tahun anggaran 2009-2013 Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa hanya variabel SiLPA yang berpengaruh pada OPA, sedangkan PAD dan <i>Flypaper Effect</i> tidak berpengaruh.
Rahmawati, (2015)	<i>Flypaper Effect</i> Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah. (Jurnal)		Analisis Regresi Linier Berganda $Y = 1X_1 + 2X_2 + e$ Dimana: Y : Belanja Daerah X1 : DAU X2 : PAD e : <i>Error term</i>	Dalam penelitian ini tidak terjadi flypaper effect, sedangkan pengaruh DAU tidak signifikan terhadap Belanja Daerah dan Pengaruh PAD signifikan terhadap Belanja Daerah.
Maimunah, (2006)	<i>Flypaper Effect</i> Pada Dana Alokasi Umum (DAU) & Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada		Regresi sederhana (<i>simple regression</i>) dan regresi berganda (<i>multiple regression</i>). $Y_i = a + b_1DAU_{1i} + e$ (hipotesis 1)	Besarnya DAU dan PAD mempengaruhi besarnya nilai Belanja daerah (pengaruh positif). Telah terjadi <i>flypaper effect</i> pada Belanja Daerah pada

Kab/Kota di Pulau Sumatera (Jurnal Ekonomi)	$Y_i = a + b_2PAD_{2i} + e$ (hipotesis 2) $Y_i = a + b_1DAU_{1i} + b_2PAD + e$ (hipotesis 3) $Y_i = a + b_1DAU_{t-1} + b_2PAD_{t-1}$ (hipotesis 4)	Kab/Kota di Sumatera. Tidak terdapat perbedaan terjadinya <i>flypaper effect</i> baik pada daerah yang PAD-nya rendah maupun daerah yang PAD-nya tinggi di Kab/Kota pulau Sumatera.
---	--	---

H. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan sebelumnya, penelitian ini akan menginvestigasi fenomena *flypaper effect* pada pola pengeluaran APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2006 - 2015. Model penelitian yang diajukan dalam gambar berikut ini merupakan kerangka konseptual dan sebagai alur pemikiran dalam menguji hipotesis :



Gambar 5, Skema Kerangka Pemikiran.

Pada Gambar 5 dapat diketahui bahwa DAU dan PAD memiliki pengaruh terhadap Belanja Pegawai. Adapun kondisi *flypaper effect* terjadi apabila nilai koefisien transfer (DAU) lebih besar dari nilai koefisien PAD dan keduanya signifikan, atau pendapatan asli daerah (PAD) tidak signifikan (Maimunah, 2006).

I. Hipotesis

1. Diduga dana transfer DAU dan PAD secara parsial dan bersama - sama berpengaruh terhadap belanja pegawai.
2. Diduga terjadi *Flaypaper Effect* pada pola pengeluaran APBD di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2006 - 2015.

III. METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasikan fenomena *flypaper effect* pada pola pengeluaran APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2006 - 2015.

B. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas, obyek/subyek mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono, 2009). Penelitian ini menggunakan populasi Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung. Jumlah Pemerintahan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung adalah sebanyak 15 pemerintahan. Populasi penelitian ini adalah Kabupaten Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Mesuji, Pesawaran, Pesisir Barat, Pringsewu, Tanggamus, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Way Kanan, Kota Metro dan Kota Bandar Lampung. Sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi (Sugiono, 2009). Dalam penelitian ini daerah yang menjadi sampel dipilih berdasarkan *Purposive Sampling* (kriteria yang dikehendaki).

Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yang masa pemerintahannya lebih dari 10 tahun.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yang telah menyusun laporan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2015.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yang mempunyai daftar laporan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) berupa : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2015 yang telah dipublikasikan melalui *website* resmi DJPK (Direktorat Jendral Perimbangan dan Keuangan).

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka ukuran sampel pada penelitian ini yaitu sebanyak 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yaitu:

1. Kabupaten Lampung Barat
2. Kabupaten Lampung Selatan
3. Kabupaten Lampung Tengah
4. Kabupaten Lampung Timur
5. Kabupaten Lampung Utara
6. Kabupaten Tanggamus
7. Kabupaten Tulang Bawang
8. Kabupaten Way Kanan
9. Kota Metro
10. Kota Bandar Lampung.

C. Jenis Penelitian dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa APBD . Adapun data APBD yang digunakan yaitu :

- a) Data laporan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 10 Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2006 - 2015.
- b) Data laporan realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) di 10 Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2006 - 2015.
- c) Data laporan realisasi Belanja Pegawai (BPegawai) di 10 Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2006 - 2015.

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data lintas waktu (*time series*) atau disebut juga data tahunan untuk tahun 2006 - 2015 dan data lintas individu (*cross section*) untuk 10 Kabupaten/Kota yang bersumber dari direktorat Jendral Perimbangan dan Keuangan (DJPK) yang diperoleh dari situs resmi (www.djpk.depkeu.go.id).

D. Batasan Variabel

Variabel - variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Pegawai.

Tabel 5. Variabel dalam penelitian

Nama Data	Simbol	Periode Waktu	Satuan Pengukuran	Sumber Data
Dana Alokasi Umum	DAU	Tahunan	Rupiah	DJPK
Pendapatan Asli Daerah	PAD	Tahunan	Rupiah	DJPK
Belanja Pegawai	BP	Tahunan	Rupiah	DJPK

1. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar - daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004. Data Dana Alokasi Umum (DAU) diperoleh dari Direktorat Jendral Perimbangan dan Keuangan (DJPk) dalam periode tahunan, (www.djpk.depkeu.go.id).

2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah dari berbagai usaha pemerintah daerah, digunakan untuk mengumpulkan dana keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin pembangunannya, yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha milik daerah, dan lain lain penerimaan asli daerah yang sah, (Rusydi, 2010). Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperoleh dari Direktorat Jendral Perimbangan dan Keuangan (DJPk) dalam periode tahunan, (www.djpk.depkeu.go.id).

3. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah pusat, pensiunan, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pejabat negara, baik yang bertugas di dalam negeri maupun di luar negeri, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal, Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2007. Belanja

Pegawai merupakan sub bagian dalam realisasi Alokasi Belanja Daerah, dan data tersebut diperoleh dari Direktorat Jendral Perimbangan dan Keuangan (DJPK) dalam periode tahunan, (www.djpk.depkeu.go.id).

E. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan untuk memperkirakan secara kuantitatif pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Pegawai. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan regresi data panel, yaitu kombinasi antara data lintas waktu (*time series*) dan lintas individu (*cross section*).

1. Model Estimasi Regresi Data Panel

Dalam estimasi data panel umumnya terdapat tiga metode penghitungan, yaitu metode *Pooled Least Square (PLS)*, *Metode Fixed Effect (FEM)*, dan metode *Random Effect (REM)*. Ketiga metode tersebut berbeda satu sama lain, spesifikasi masing-masing metode sebagai berikut :

1.1. Metode *Pooled Least Square*

Metode pendekatan ini tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu. Diasumsikan bahwa perilaku data antar daerah sama dalam berbagai kurun waktu (Widarjono, 2009). Estimasi model *Pooled Least Square* merupakan bentuk estimasi paling sederhana dalam pengujian data panel yaitu hanya mengombinasikan data *cross section* dan *time series* sehingga dapat dikatakan bahwa model ini sama halnya dengan metode *Ordinary Least Square* karena menggunakan kuadrat kecil biasa. Metode *Pooled Least Square* mengasumsikan intersept dan slope koefisien adalah identik atau memperlakukan sama untuk

semua sampel *cross section*, sehingga kurang mampu menggambarkan kondisi sesungguhnya.

Analisis data menggunakan model regresi berganda yang digunakan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Pegawai di Sumatera dengan menggunakan metode OLS (*Ordinary Least Square*).

Model umum dari analisis ini adalah :

$$BP_{it} = \beta_{0i} + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 DAU_{it} + \epsilon_{it}$$

Keterangan :

- BP_{it} = Belanja Pegawai di Kabupaten/Kota i , tahun t .
- PAD_{it} = Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota i , tahun t .
- DAU_{it} = Dana Alokasi Umum di Kabupaten/Kota i , tahun t .
- β_0 = Intersep
- β_i = Koefisien variabel bebas
- i = Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung
- t = Tahun
- ϵ_{it} = gangguan

1.2. Metode *Fixed Effect*

Dalam pendekatan ini mengasumsikan bahwa intersep antar *cross section* adalah berbeda namun slponya tetap sama. Teknik estimasi data panel dengan metode *Fixed Effect Model* menggunakan variabel *dummy* (variabel boneka) yang memiliki nilai 0 untuk tidak terdapat pengaruh dan 1 untuk variabel yang memiliki pengaruh. Fungsi *dummy* yaitu untuk menangkap adanya perbedaan intersep antar *cross section*. Permodelan ini lebih dikenal dengan teknik *Least Square Dummy Variables (LSDV)*. Penambahan variabel *dummy* mungkin relatif sederhana, akan tetapi hasil estimasi relatif kompleks jika menggunakan jumlah

cross section yang banyak. Permasalahan heteroskedastisitas yang menyebabkan data menjadi bias dalam data panel seringkali muncul. Penggunaan metode *Generalized Least Square (GLS)* merupakan metode yang umum digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut, (Widarjono, 2009).

Secara umum, model pendekatan *fixed effect* dapat dituliskan sebagai berikut :

$$BP_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 D_{1i} + \alpha_2 D_{2i} + \alpha_3 D_{3i} + \alpha_4 D_{4i} + \alpha_5 D_{5i} + \alpha_6 D_{6i} + \alpha_7 D_{7i} + \alpha_8 D_{8i} + \alpha_9 D_{9i} + \alpha_{10} D_{10i} + \alpha_{11} D_{11i} + \alpha_{12} D_{12i} + \alpha_{13} D_{13i} + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 DAU_{it} + \varepsilon_{it}$$

(Model 2, jika menggunakan *Fixed Effect Model*)

Variabel di $D_{1i} = 1$ untuk objek pertama dan 0 untuk objek lainnya. Variabel $D_{2i} = 1$ untuk objek kedua dan 0 untuk objek lainnya. Variabel semu $D_{3i} = 1$ untuk objek ketiga dan 0 untuk objek lainnya dan seterusnya. Dengan menggunakan pendekatan ini, akan terjadi *degree of freedom* sebesar $NT - N - K$. Keputusan memasukkan variabel boneka ini harus didasarkan pada pertimbangan statistik. Hal tersebut disebabkan, dengan melakukan penambahan variabel boneka akan dapat mengurangi jumlah *degree of freedom* yang pada akhirnya akan mempengaruhi koefisien dari parameter yang diestimasi, (Widarjono, 2009).

1.3. Metode *Random Effect*

Metode *Random Effect Model* menggunakan pendekatan variabel gangguan (*error term*) untuk mengetahui hubungan antar *cross section* dan *time series*. Cara ini cenderung melihat perubahan antar individu dan antar waktu. Permodelan sebelumnya yaitu *Fixed Effect Model* dengan tambahan variabel *dummy* dapat mengurangi banyaknya *degree of freedom* yang akhirnya mengurangi efisiensi parameter yang diestimasi. Sehingga metode *Random Effect Model* hadir dengan

menyempurnakan model *Fixed Effect Model*. Adapun penyelesaian masalah korelasi antar *error term* pada model *Random Effect Model* dapat diatasi dengan metode *Generalized Least Square (GLS)*, (Widarjono, 2009).

2. Pemilihan Metode Regresi Data Panel

Estimasi data panel yang terdiri dari 3 macam metode yaitu *Pooled Least Square (PLS)*, *Fixed Effect Model (FEM)*, dan *Random Effect Model (REM)*. Tentu dalam pengujian diharuskan memilih permodelan yang terbaik. Maka terdapat dua cara pengujian yang umum digunakan yaitu uji Chow dan uji Housman, (Widarjono, 2009).

2.1 Uji Chow

Uji Chow dilakukan untuk memilih permodelan terbaik antara *Pooled Least Square (PLS)* dan *Fixed Effect Model (FEM)*. Caranya dengan melihat determinasi (R^2) dan nilai *DW-statistics*. Nilai yang tinggi dari dua pengujian tersebut akan mengindikasikan pemilihan model terbaik, apakah menggunakan metode *Pooled Least Square* atau *Fixed Effect Model*, (Widarjono, 2009).

Adapun hipotesis dari pengujian ini *restricted F-Test* yaitu :

H_0 : Model *Pooled Least Square (restricted)*.....menerima H_0

H_a : Model *Fixed Effect (unrestricted)*.....menolak H_0

Uji Chow dirumuskan :

$$CHOW = \frac{(RRSS - URSS) / (N - 1)}{URSS / (NT - N - K)}$$

Dimana :

$RRSS$ = *Restricted Residual Sum Square* (Merupakan *Sum of Square Residual* yang diperoleh dari estimasi data panel dengan metode *pooled least square / common intercept*)

URSS = *Unrestricted Residual Sum Square* (merupakan *Sum of Square Residual* yang diperoleh dari estimasi data panel dengan metode *fixed effect*)

N = jumlah data *cross section*

T = Jumlah data *time series*

K = Jumlah variabel penjelas

2.2 Uji Hausman

Pengujian *Hausman* untuk memilih model terbaik antara *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model* dalam estimasi data panel. Hipotesis yang digunakan yaitu :

H_0 : Model *Random Effect*.....menerima H_0

H_a : Model *Fixed Effect*.....menolak H_0

Cara melihat model terbaik yaitu dengan melihat *chi square statistic* dengan *degree of freedom* ($df=k$), dimana k adalah jumlah koefisien variabel yang diestimasi. Jika pada pengujian menunjukkan hasilnya signifikan artinya menolak H_0 artinya metode yang dipilih adalah *Fixed Effect Model* dan sebaliknya jika tidak signifikan maka model yang terbaik adalah *Random Effect Model*, (Widarjono, 2009).

F. Pengujian Hipotesis

Komponen utama dalam pengujian ekonometrika adalah pengujian hipotesis. Pengujian ini memiliki kegunaan dalam penarikan kesimpulan penelitian, selain itu uji hipotesis digunakan untuk mengetahui keakuratan data. Terdapat tiga bentuk pengujian yaitu uji t , uji F , dan koefisien determinasi.

1. Uji t

Uji t dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh nyata dari tiap – tiap variabel bebas terhadap variabel terikat, (Gujarati, 2010). Pengujian ini dilakukan dengan

membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} . Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak yang artinya masing – masing variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima, artinya secara parsial variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen, (Gujarati, 2010).

2. Uji F

Uji F merupakan pengujian hipotesis untuk mengetahui pengaruh variabel bebas bersama – sama terhadap variabel terikat apakah pengaruh signifikan atau tidak, (Gujarati, 2010). Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima, yang artinya secara bersama – sama variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. Akan tetapi jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka secara bersama – sama variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat, (Gujarati, 2010).

3. Koefisien determinasi (R^2)

Koefisien determinasi memiliki nilai 0 sampai 1 ($0 < R^2 < 1$). Semakin besar koefisien determinasi menunjukkan semakin besar pula variasi variabel bebas dalam membentuk variabel terikat.

G. Gambaran Umum Provinsi Lampung

1. Keadaan Geografis

Provinsi Lampung dengan ibukota Bandar Lampung secara geografis terletak antara $6^\circ 45'$ - $3^\circ 45'$ lintang selatan dan $103^\circ 40'$ - $105^\circ 50'$ bujur timur dengan luas wilayah $35.376,84 \text{ km}^2$. Secara administratif Provinsi Lampung terletak di ujung selatan Pulau Sumatera, letaknya sangat strategis ini menjadi sentral penghubung antara Pulau Jawa dan Sumatera, dimana :

Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Sumatera Selatan

Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa

Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Sunda

Sebelah Barat berbatasan dengan Samudra Hindia

2. Topografi

Secara topografi Provinsi Lampung dapat dibagi dalam 5 (lima) unit topografi, yaitu :

- 1) Daerah berbukit sampai bergunung dengan kemiringan berkisar 25% dan ketinggian rata-rata 300m diatas permukaan laut.
- 2) Daerah berombak sampai bergelombang dengan kemiringan antara 8% sampai 15% dan ketinggian antara 300m sampai 500m dari permukaan laut.
- 3) Daerah daratan allufial dengan kemiringan 0% sampai 3%.
- 4) Daerah dataran rawa pasang surut dengan ketinggian 1/2m sampai 1m.
- 5) Serta daerah River basin.

3. Administrasi Pemerintahan

Pada tahun 2013, jumlah penduduk Provinsi Lampung berjumlah 8.245.978 jiwa yang terdiri dari 2 kota dan 13 kabupaten.

Tabel 6. Luas Wilayah

Kabupaten/Kota	Ibu Kota	Luas Area (Km ²)
Bandar Lampung	Bandar Lampung	296,00
Lampung Barat	Liwa	2.142,78

Lampung Selatan	Kalianda	700,32
Lampung Tengah	Gunung Sugih	3.802,68
Lampung Timur	Sukadana	5.325,03
Lampung Utara	Kota Bumi	2.725,87
Mesuji	Mesuji	2.184,00
Metro	Metro	61,79
Pesawaran	Gedong Tataan	2.243,51
Pesisir Barat	Krui	2.907,23
Pringsewu	Pringsewu	625,00
Tanggamus	Kota Agung	3.020,64
Tulang Bawang	Menggala	3.466,32
Tulang Bawang Barat	Panaraga	1.201,00
Way Kanan	Blambangan Umpu	3.921,63

Sumber : Kemendagri.go.id diakses 2015

Berikut ini merupakan Kabupaten hasil pemekaran sejak tahun 1991 :

1. Kabupaten Lampung Barat, pemekaran dari Kabupaten Lampung Utara, 16 Agustus 1991.
2. Kabupaten Tulang Bawang, pemekaran dari Kabupaten Lampung Utara, 3 Januari 1997.
3. Kabupaten Tanggamus, pemekaran dari Kabupaten Lampung Selatan, 3 Januari 1997.
4. Kabupaten Way Kanan, pemekaran dari Kabupaten Lampung Utara, 20 April 1999.

5. Kabupaten Lampung Timur, pemekaran dari Kabupaten Lampung Tengah,
20 April 1999.
6. Kota Metro. Pemekaran dari Kabupaten Lampung Tengah,
20 April 1999.

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Hasil penelitian membuktikan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif secara statistik dan tidak signifikan, terhadap Belanja Pegawai, yang berarti semakin meningkatnya variabel Pendapatan Asli Daerah maka tidak memiliki pengaruh yang kuat terhadap peningkatan Alokasi Belanja Pegawai pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
2. Variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh positif secara statistik, terhadap Belanja Daerah, yang berarti semakin meningkatnya variabel Dana Alokasi Umum maka akan meningkatkan Alokasi Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
3. Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung terdeteksi adanya fenomena *flypaper effect*. Hal ini menjelaskan bahwa pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung masih terdapat ketergantungan pada penggunaan Dana Alokasi Umum untuk membiayai Alokasi Belanja Pegawai yang tercermin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

B. Saran

1. Hendaknya Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung lebih berusaha untuk menggali potensi penerimaan pendapatan daerah dalam upaya untuk menciptakan kemandirian daerah sehingga ketergantungan terhadap dana transfer yang dalam hal ini berupa Dana Alokasi Umum dapat semakin berkurang.
2. Hendaknya Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung lebih meningkatkan pengawasan atas penggunaan Dana Alokasi Umum sebagai sumber alokasi Belanja Pegawai, agar dana yang digunakan lebih dialokasikan kepada sektor sektor yang produktif, yang mendukung peningkatan penerimaan pendapatan daerah.
3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperbanyak jumlah sampel kabupaten/kota yang hendak diteiti agar dapat menambah wawasan secara keseluruhan mengenai tingkat kemandirian daerah pada Kabupaten/Kota yang menjadi bahan penelitian.

Daftar Pustaka

- Afrizawati. 2012. Analisis *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah Kab/Kota di Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (JENIUS)*. Vol. 2 No 1, Januari 2012.
- Amril. 2015. Flypaper Effect pada Kinerja Keuangan Kab/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah vol 2 no 3, 2015*.
- Aulia, Ria Ramadhonna. 2013. Analisis *Flypaper Effect* Pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Tesis UNILA, Lampung.
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Departemen Keuangan – Republik Indonesia, 2012. Realisasi APBD 2006-2012. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/data-series/data-keuangan-daerah/setelah-ta-2006>
- Gujarati, D. 2010. *Ekonometrika Dasar*. Zain dan Sumarno (Penerjemah), Erlangga, Jakarta.
- Halim, Abdul. 2002. Seri Akuntansi Sektor Publik – Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Hastuti, 2011. Analisis *Flypaper Effect* Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Kinerja SKPD Pada Kab/Kota Semarang. Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro.
- Ika, 2013. *Flypaper Effect* Pada PAD dan DAU terhadap Belanja Daerah (Studi Pada Kota/Kabupaten di Provinsi Banten 2008-2012). *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom*.
- Iskandar, 2012. *Flypaper Effect* Pada *Unconditional Grant*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, volume 13, Nomor 1, Juni 2012.
- Junaidi, 2011. Asimetri Pada *Flypaper Effect* : Bukti Empiris Pemanfaatan Dana Alokasi Umum Pada Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol 14 No 1, Mei 2012*.
- Kuncoro, Haryo. 2004. Pengaruh Transfer Antar Pemerintah Pada kinerja Fiskal Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 9*.

- Maimunah, Mutiara. 2006. Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. Simposium Nasional Akuntansi IX. Padang.
- Mardiasmo, 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Marissa, 2014. *Flypaper Effect* Pada DAU dan PAD Terhadap Belanja Daerah Kab/Kota di Jawa Tengah Tahun 2011-2012. Skripsi UNDIP, Semarang.
- Megasari, 2015. Pengaruh PAD, Selisih Lebih Perhitungan Anggaran Dan *Flypaper Effect* Pada Prilaku Oportunistik Penyusunan Anggaran, *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, vol 20 No.20, Agustus 2015.
- Miyasto, 2009. Bahan Kuliah Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal. Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.
- Muhammad Armawaddin, 2015. Analisis *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah Kab/Kota di Sulawesi Tenggara, Volume XVI Tahun 8, Desember 2015.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 _____ 21 Tahun 2011 Tentang Belanja Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.
 _____ 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah.
 _____ 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan.
- Pramuka, B.A dan D.W Al-Firsta. 2010. *Flypaper Effect* Pada Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten Di Karesidenan Banyumas. Skripsi. Sarjana Ekonomi Akuntansi Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto.
- Pratiwi, Hayu Listia. 2013. Analisis Flypaper Effect Pada Pengeluaran Pemerintah Daerah Di Kabupaten Lampung Selatan. Skripsi Unila, Lampung.
- Rahmawati, *Flypaper Effect* Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol 4 No 9, 2015.
- Simanjuntak, Payaman. 2001. Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia. Fakultas Ekonomi UI, Jakarta.
- Sudrajat. 2010. "Fenomena Flypaper Effect Pada Kabupaten/Kota Di Propinsi Lampung". Jurnal ESAI. Vol. 4 No. 3. Juli.Suyanto. 2010. *Flypaper Effect Theory* dalam Implementasi Kebijakan Desentralisasi Fiskal. Jurnal

- Ekonomi Pembangunan Volume 11, Nomor 1, Juni 2010, halaman 69-92.
- Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tampubolon, Leonard P. 2011. *Fenomena Flypaper Effect Pada Belanja Daerah Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Propinsi Riau*. Skripsi. Sarjana Ekonomi Akuntansi Universitas Sumatra Utara. Medan.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, pasal 64 ayat 2 tentang Pokok - pokok Pemerintahan Daerah.
- _____ 23 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- _____ 32 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.
- _____ 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- _____ 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- _____ 45 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- _____ 47 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Widarjono, Agus. 2009. *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*. Edisi Ketiga, Penerbit Andi, Yogyakarta
- Wulan L, Priyo Hari Adi. 2008. Perilaku Asimetris Pemerintah Daerah Terhadap Transfer Pemerintah Pusat. *The 2nd National Conference UKWMS*. Surabaya.